



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA**

JL. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT 10410 TELEPON (021)
34835141 FAKSIMILE (021) 3441403

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode TA 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Dodok Dwi Handoko



Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 60.423.760.643 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak. Realisasi Pendapatan tersebut berada di atas estimasi Pendapatan Tahun 2025 yakni sebesar Rp 48.774.885.000

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 8.626.143.444 atau mencapai 63 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.061.350.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 395.701.117.700,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.181.107.484,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp394.477.103.265,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp42.906.951,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar sebesar Rp169.090.538,00 dan Rp395.532.027.162,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp59.874.984.443 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 14.554.096.920 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp 45.320.887.523. Surplus Pelepasan Aset Non Lancar dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 122.652.004 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 45.479.178.269.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp 439.529.486.810 ditambah Surplus-LO sebesar Rp45.479.178.269 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp1.533.065 dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp89.478.170.982 sehingga Ekuitas entitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 395.532.027.162.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	Desember 2025		% thd	Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI	Angg	REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	48,774,885,000.00	60,423,760,643.00	123,88	58,198,413,135.00
JUMLAH PENDAPATAN		48,774,885,000.00	60,423,760,643.00	123,88	58,198,413,135.00
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	9,382,605,000.00	7,948,147,102.00	84.71	10,918,427,710.00
Belanja Modal	B.2.3	1,678,745,000.00	677,996,342.00	40.39	3,454,059,271.00
JUMLAH BELANJA		11,061,350,000.00	8,626,143,444.00	77,98	14,372,486,981.00

II. Neraca

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C2	-	-
Pendapatan yang masih harus diterima	C3	1,031,261,975.00	1,331,938,786.00
Belanja Dibayar Dimuka	C4	-	-
Persediaan	C5	149,845,509.00	195,664,663.00
Jumlah Aset Lancar		1,181,107,484.00	1,527,603,449.00
ASET TETAP			
Tanah	C6	333,838,140,000.00	370,616,438,000.00
Peralatan dan Mesin	C7	18,161,627,848.00	18,489,266,589.00
Gedung dan Bangunan	C8	102,604,082,303.00	104,415,592,582.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C9	-	-
Aset Tetap Lainnya	C10	8,556,500.00	8,556,500.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C11	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C12	(60,135,303,386.00)	(55,329,842,286.00)
Jumlah Aset Tetap		394,477,103,265.00	438,200,011,385.00
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C13	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	C14	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C 15	42,906,951.00	146,870,458.00
Jumlah Aset Lainnya		42,906,951.00	146,870,458.00
JUMLAH ASET		395,701,117,700.00	439,874,485,292.00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C16	43,976,066.00	301,638,857.00
Uang Muka dari KPPN	C17	-	-
Pendapatan diterima dimuka	C18	125,114,472.00	43,359,625.00
Utang yang Belum Ditagihkan	C19	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		169,090,538.00	344,998,482.00
JUMLAH KEWAJIBAN		169,090,538.00	344,998,482.00
EKUITAS			
Ekuitas	C20	395,532,027,162.00	439,529,486,810.00
JUMLAH EKUITAS		395,532,027,162.00	439,529,486,810.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		395,701,117,700.00	439,874,485,292.00

III. Laporan Operasional

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	59,874,984,443.00	58,179,994,037.00
Jumlah Pendapatan		59,874,984,443.00	58,179,994,037.00
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	151,695,774.00	92,596,111.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,021,830,601.00	6,360,796,121.00
Beban Pemeliharaan	D.5	3,432,933,985.00	3,900,518,306.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	388,575,011.00	447,650,359.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	6,559,061,549.00	6,509,028,314.00
Jumlah Beban		14,554,096,920.00	17,310,589,211.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		45,320,887,523.00	40,869,404,826.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.8	122,652,004.00	259,625,000.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	35,638,742.00	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		158,290,746.00	259,625,000.00
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		45,479,178,269.00	41,129,029,826.00
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		45,479,178,269.00	41,129,029,826.00

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	441,097,611,138.00	441,097,611,138.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	45,479,178,269.00	41,129,029,826.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	1,535,865.00	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		1,535,865.00	-
LAIN-LAIN		(2,800.00)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(89,478,170,982.00)	(42,697,154,154.00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(43,997,459,648.00)	(1,568,124,328.00)
EKUITAS AKHIR	E.6	395,532,027,162.00	439,529,486,810.00

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah DJKN Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal DJKN, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas pelayanan di bidang pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, pelayanan penilaian, dan pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berkomitmen dengan visi:

“menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar– besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta menjalankan misi sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan Negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang Negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien,transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;

3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman;
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pengelolaan Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kontributif berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. Instrumental berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. Otoritatif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional maupun internasional;
- d. Berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan tata Kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;
- e. Adaptif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya;

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta menetapkan Misi seperti yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Periode Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara / Lembaga.

SAKTI terdiri dari modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul aset tetap, modul piutang serta modul akuntansi dan pelaporan. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kanwil DJKN DKI Jakarta Periode Tahun 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kanwil DJKN DKI Jakarta yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah 6 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

REKAPITULASI JUMLAH SATKER UAPPA-W

NO	KODE WILAYAH	URAIAN	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	007	Kanwil DJKN DKI Jakarta	-	1	-	-	1
2	007	KPKNL Jakarta I	-	1	-	-	1
3	007	KPKNL Jakarta II	-	1	-	-	1
4	007	KPKNL Jakarta III	-	1	-	-	1
5	007	KPKNL Jakarta IV	-	1	-	-	1
6	007	KPKNL Jakarta V	-	1	-	-	1
Jumlah			-	6	-	-	6

*Basis
Akuntansi***A.3. BASIS AKUNTANSI**

Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4.DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LRA

1. Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan – LO

2. Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- ✓ Pendapatan Sewa Bangunan diakui pada saat dikeluarkannya Surat Izin Penghunian secara proposional antara nilai dan periode waktu sewa
- ✓ Pendapatan Bea Lelang Pejabat Kelas II diakui pada saat diterima setoran bea lelang ke kas negara.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban oleh pemerintah.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Nilai persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ✓ harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

*Penyusutan
Aset Tetap***c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang Sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang

sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;

- c) Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- d) Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Formula Metode Garis Lurus. adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Uraian	Realisasi s.d. Desember 2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	60,423,760,643	48.774.885.000
Jumlah Pendapatan	60,423,760,643	48.774.885.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	7.948.147.102	9.382.605.000
Belanja Modal	677.996.342	1.678.745.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	8.626.143.444	11.061.350.000

Realisasi
Pendapatan

Rp60.423.760.
643

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.423.760.643 atau mencapai 123,88 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp48.774.885.000. Pendapatan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp60.423.760.643. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025

Uraian	Perbandingan		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	48.774.885.000	60.423.760.643	123,88
Jumlah	48.774.885.000	60.423.760.643	123,88

Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	60.423.760.643	58.198.413.135	3,82
,Jumlah	60.423.760.643	58.198.413.135	3,82

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp60.423.760.643 dan Rp58.198.413.135. Penerimaan Negara Bukan Pajak Periode TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,82 persen dari TA 2024 dikarenakan adanya sewa Koperasi BUPIN, ATM BRI dan ATM BNI.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan LRA sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	90.000	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	103.276.800	249.569.000	(58,62)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	27.429.000	10.056.000	172,76
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	147.805.000	15.692.000	841,91
Pendapatan Jasa Lainnya	-	120.000	-
Pendapatan Denda	40.342.559	4.978.806	710,29
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	60.069.268.542	57.938.907.329	3,68
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	35.638.742	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	(21.000.000)	-
Jumlah	60.423.760.643	58.198.413.135	3,82

Realisasi Belanja
Negara

Rp8.626.143.444

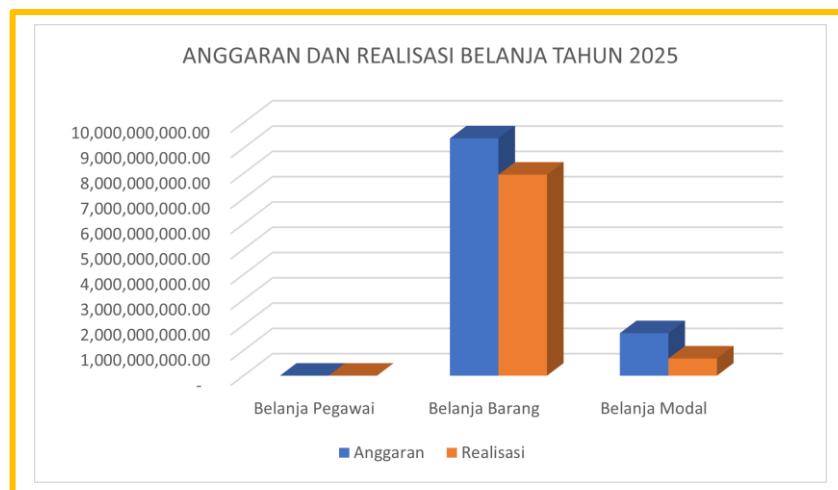
B.2. BELANJA

Realisasi belanja Kanwil DJKN DKI Jakarta per 31 Desember 2025 adalah Rp8.626.143.444 atau 77,98% dari anggaran belanja sebesar Rp11.061.350.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%Realisasi
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	9.382.605.000	7.948.147.102	84.71%
Belanja Modal	1.678.745.000	677.996.342	40.39%
Jumlah	11.061.350.000	8.626.143.444	77.98%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Periode Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 39.98%. Hal itu dikarenakan adanya Efisiensi Anggaran Sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilakukan blokir anggaran dalam rangka efisiensi sebesar Rp2.079.988.000 dengan rincian blokir belanja barang sebesar Rp1.233.682.000 dan blokir belanja modal sebesar Rp846.306.000. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	7.948.147.102	10.918.427.710	(27.20)
Belanja Modal	677.996.342	3.454.059.271	(80.37)
Jumlah	8.626.143.444	14.372.486.981	(39.98)

Realisasi Belanja Pegawai

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Rp0

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar 0.00 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta telah mengimplementasikan sentralisasi belanja pegawai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2021 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI	REALISASI	%
	2025	2024	
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja
Barang
Rp7.948.147.102

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.948.147.102 dan Rp7.496.463.197. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 6.03% dari realisasi TA 2024.

Kenaikan realisasi belanja barang pada TA 2025 dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberlakuan WFH semakin sedikit yang mengakibatkan pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah mulai leluasa melakukan aktivitas yang membuat kenaikan belanja perjalanan dalam negeri
2. Adanya penambahan pagu anggaran untuk belanja operasional.
3. Adanya penambahan pagu anggaran untuk belanja pemeliharaan terutama pemeliharaan gedung dan bangunan yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan gedung dan bangunan akibat kerusakan

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	%
Belanja Barang Operasional	3.550.703.184	2.334.509.978	52.10
Belanja Barang Non Operasional	422.086.992	417.006.781	1.22
Belanja Barang Persediaan	2.558.500	19.998.200	-87.21
Belanja Jasa	47.971.310		-
Belanja Pemeliharaan	3.536.302.105	2.945.913.852	20.04
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	388.575.011	264.122.343	47.12
Jumlah Belanja Kotor	7.948.197.102	7.496.463.197	6.03
Pengembalian Belanja	50.000	0	0
Jumlah Belanja	7.948.147.102	7.496.463.197	6.03

Realisasi Belanja
Modal

B.2.3 BELANJA MODAL

Rp677.996.342

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp677.996.342 dan 1.826.500.998. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	677.996.342	935.783.157	(27.55)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	890.717.841	-
Jumlah Belanja Kotor	677.996.342	1.826.500.998	(62.88)
Pengembalian			
Jumlah Belanja	677.996.342	1.826.500.998	(62.88)

Realisasi Belanja Modal TA 2025 lebih kecil dibandingkan dengan TA 2024 dikarenakan :

1. Adanya efisiensi anggaran di Tahun 2025 sehingga mengalami pemblokiran anggaran di belanja modal Tahun 2025
2. Tidak adanya belanja modal gedung dan bangunan.
3. Adanya larangan optimalisasi belanja modal atas peralatan dan mesin yang telah mencapai output yang ditentukan

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.- dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah	0	0

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, Kantor Wilayah DJKN DJKI Jakarta telah menggunakan rekening virtual pada Rekening Pengeluaran. Adapun rekening pengeluaran *Virtual Account* pada Bank Negara Indonesia dengan nomor: 9890144118521000.

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

uang tunai di tangan Bendahara Penerimaan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Adapun jumlah kas lainnya dan setara kas sebesar Rp0.-

Pendapatan yang
masih harus diterima
Rp1.031.261.975

C.3. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.031.261.975 dan Rp1.331.938.786. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang berasal dari Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II yang pelaksanaan lelangnya dilaksanakan bulan Desember 2025 dan pelunasannya dilakukan pada bulan Januari 2026.

Belanja Dibayar Dimuka
(Prepaid) Rp0

C.4. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut:

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka	Rp0	Rp0
Jumlah	Rp0	Rp0

Persediaan
Rp149.845.509

C.5. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp149.845.509 dan Rp195.664.663. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 23 persen dari Tahun 2024 dikarenakan pengurangan anggaran persediaan dan pemakaian arang persediaan. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

JENIS	REALISASI 2025	REALISASI 2024	KENAIKAN /TURUN %
Beban Persediaan Konsumsi	149.845.509	195.664.663	(23,42)
Jumlah	149.845.509	195.664.663	(23,42)

Tanah
Rp333.838.140.000

C.6. TANAH

Nilai tanah yang dimiliki Kanwil DJKN DKI Jakarta per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp333.838.140.000.00. Mutasi Aset Tetap Tanah Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

URAIAN	KUANTITAS	NILAI
Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2025	10.034 m ²	370.616.438.000
Mutasi Tambah :		
-Pembelian		0
Mutasi Kurang :		
- Penghapusan	728 m ²	36.778.298.000
Saldo Per 31 Desember 2025	9.306 m²	333.838.140.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025		333.838.140.000

Nilai Tanah berkurang dikarenakan ada alih guna Tanah Rumah Negara seluas 728m² senilai Rp36.778.298.000,00 yang terletak di Jalan Prapanca Jakarta Selatan

C.7. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan Mesin
Rp18.161.627.848

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp18.161.627.848 dan Rp18.489.266.589. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	18.489.266.589
Mutasi tambah:	
Pembelian	677.996.342
Transfer masuk	566.833.950
Reklasifikasi Masuk	30.717.300
Mutasi Kurang:	Mutasi Kurang:
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	1.710.964.883
Transfer Keluar	5.142.150
Reklasifikasi Keluar	30.717.300
Saldo per 31 Desember 2025	18.161.627.848
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(14.697.699.281)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	3.463.928.567

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	18.489.266.589
Mutasi tambah:	
Pembelian	677.996.342
Transfer masuk	566.833.950
Reklasifikasi Masuk	30.717.300
Mutasi Kurang:	Mutasi Kurang:
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	1.710.964.883
Transfer Keluar	5.142.150
Reklasifikasi Keluar	30.717.300
Saldo per 31 Desember 2025	18.161.627.848
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(14.697.699.281)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	3.463.928.567

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berupa pembelian 81 (delapan puluh satu) unit Peralatan dan Mesin serta transfer masuk sebanyak 23 unit Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Jumlah	Nilai
Lemari Besi/Metal	2	6.200.000.00
Rak Besi	30	77.999.989.00
Filing Cabinet Besi	2	4.595.400.00
Tabung Pemadam Api	10	17.000.005.00
CCTV - Camera Control Television System	1	69.525.000.00
LCD Projector/Infocus	2	13.999.999.00
Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	7.000.000.00
Meja Kerja Besi/Metal	2	23.898.300.00
Kursi Besi/Metal	8	22.377.600.00
Sice	2	18.908.850.00
Lemari Es	1	4.684.200.00
A.C. Split	15	399.374.999.00
Dispenser	4	12.432.000.00
Jumlah	81	677.996.342.00

Transfer Masuk Peralatan dan Mesin :

- a. 1 (satu) unit Minibus senilai Rp330.000.000
- b. 3 (tiga) unit LCD Projector senilai Rp48.522.650
- c. 19 (Sembilan belas) unit Laptop senilai Rp230.400.000

Gedung dan
Bangunan
Rp102.604.082.303

C.8. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp102.604.082.303 dan Rp102.140.432.368. Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	104.415.592.582
Mutasi tambah:	
Koreksi Pencatatan	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Transfer Keluar	1.811.510.279
Saldo per 31 Desember 2025	102.604.082.303
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(45.437.604.105)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	57.166.478.198

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan. Irigasi dan
Jaringan Rp0

C.9. JALAN. IRIGASI. DAN JARINGAN

Saldo Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan. Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	0
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan	(0)
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(0)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Aset Tetap Lainnya
Rp8.556.500

C.10. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp8.556.500. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	8.556.500
Saldo per 31 Desember 2025	8.556.500
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	8.556.500

Aset Tetap Lainnya pada Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berupa :

1. 50 (lima puluh) Buku Lainnya senilai Rp2.916.500;
2. 10 (sepuluh) Lukisan Kanvas senilai Rp5.640.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.11. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Tidak adanya Kontruksi dalam pengerjaan pada Kanwil DJKN DKI Jakarta pada TA 2025.

Saldo awal per 1 Januari 2025	0
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	0
Pengembangan KDP	0
Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp60.135.303.386

C.12. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp60.135.303.386 dan Rp52.358.756.876. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	18.161.627.848	(14.697.699.281)	3.463.928.567
2	Gedung dan Bangunan	102.604.082.303	(45.437.604.105)	57.166.478.198
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Akumulasi Penyusutan		120.765.710.151	(60.135.303.386)	60.630.406.765

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain
Rp0

C.13. ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Barang Yang Mau Dihapuskan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Lain-lain disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Lain-Lain
Rp0*

C.14. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 September 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sementara itu, amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Total	-	-	-

*Dana yang
dibatasi
penggunaannya
Rp42.906.951*

C.15. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp42.906.951 dan Rp146.870.458. Dana yang dibatasi penggunaannya berasal dari transaksi RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun) yang BAST nya telah dicatat pada tahun 2025 namun proses pembayarannya dilakukan di tahun 2026. Adapun dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana untuk pembayaran Jasa Teknisi Mekanikal Elektrikal Plumbing Tahun 2025.

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp 301.638.857*

C.16. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 43.976.066 dan Rp 301.638.857. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024
Utang kepada Pihak Ketiga	43.976.066	301.638.857
Total	43.976.066	301.638.857

Uang Muka dari
KPPN
Rp0

C.17. UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Total	-

Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp125.114.472

C.18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp125.114.472 dan Rp43.359.625. Pendapatan Diterima Di muka merupakan pendapatan sewa yang terjadi dengan pembayaran diterima di muka pada Kanwil DJKN DKI Jakarta. Adapun rincian sewa yang dimaksud berupa Sewa untuk Mesin ATM BRI, BNI serta Koperasi Bupin.

Utang yang
Belum Ditagihkan
Rp518.114.128

C.19. UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp518.114.128 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang mesti harus dibayarkan yang termuat dalam SPBy atau SPM yang belum di SP2D.

Ekuitas
Rp395.532.027.162

C.20. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp395.532.027.162 dan Rp439.895.817.820. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp59.874.984.443

D.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp59.874.984.443 dan Rp 58.179.994.037. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2.91 persen.

Salah satu sumber pendapatan PNBPN pada tahun 2025 adalah Pendapatan Sewa Tanah. Gedung dan Bangunan. Pendapatan Jasa Lainnya. Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II. dan Pendapatan Denda Lainnya.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	90.000	-
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	66.050.153	64.657.834	2.15
Pendapatan Jasa Lainnya	0	120.000	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	59.768.591.731	58.110.147.397	2.85
Pendapatan Denda Lainnya	40.342.559	4.978.806	710.29
Jumlah	59.874.984.443	58.179.994.037	2.91

Beban
Pegawai
Rp0

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Beban Uang Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban
Persediaan
Rp151.695.774*

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 151.695.774 dan Rp 92.596.111.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	151.695.774	92.596.111	63.83
Jumlah Beban Persediaan	151.695.774	92.596.111	63.83

Beban Barang
dan Jasa
Rp4.021.830.6
01

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4.021.830.601 dan Rp 6.360.796.121.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 36.77% dibandingkan dengan Tahun 2024. hal ini disebabkan karena anggaran belanja langganan listrik dan belanja langganan Telepon dibayarkan melalui Kantor Pusat. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

Uraian Jenis Beban	Realisasi TA 2025	Realisasi TA2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	3.392.270.909.	3.397.734.182.	-0.16%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	985.720.		0.00%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.103.555.	2.639.460.	17.58%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	106.080.000.	81.388.000.	30.34%
Beban Barang Operasional Lainnya	48.840.000.	4.688.914.	941.61%
Beban Bahan	140.614.292.	361.859.281.	-61.14%
Beban Honor Output Kegiatan	200.012.000.	304.800.000.	-34.38%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	81.460.700.	79.200.000.	2.85%
Beban Langganan Air	18.946.550.	13.494.860.	40.40%
Beban Langganan Telepon	0.	5.087.643.	-100.00%
Beban Langganan Listrik	0.	1.974.629.581.	-100.00%
Beban Sewa	8.116.875.	92.374.200.	-91.21%
Beban Jasa Profesi	21.400.000.	42.900.000.	-50.12%
	4.021.830.601.	6.360.796.121.	-36.77%

Beban
Pemeliharaan
Rp3.432.933.985

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.432.933.985 dan Rp 3.900.518.306. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 11.99 persen dari Tahun 2024 dikarenakan Tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran sehingga terdapat anggaran yang mengalami pemblokiran. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.683.835.165	3.086.478.084	-13.05
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	65.672.317	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	541.730.930	646.447.748	-16.20
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-50.000	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	141.745.573	167.592.474	-15.42
Jumlah	3.432.933.985	3.900.518.306	-11.99

Beban Perjalanan Dinas
Rp388.575.011

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp388.575.011 dan Rp 447.650.359. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 12.96% dikarenakan pada Tahun 2024 sudah menurunnya angka COVID-19 maka dari itu pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah dapat kembali melakukan perjalanan dinas:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	264.960.511	294.994.130	-10.18
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa		-9.407.271	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	123.614.500	162.213.500	-23.80
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		-150.000	-
Jumlah	388.575.011	447.650.359	-13.20

D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp
6.559.061.549*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 6.559.061.549 dan Rp6.509.028.314. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.152.218.878	1.124.530.081	2.46
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.406.842.671	5.384.498.233	0.41
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	-	-	0
Jumlah Penyusutan	6.559.061.549	6.509.028.314	0.77
Beban Amortisasi Hak Cipta	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	6.559.061.549	6.509.028.314	0.77

Surplus
Penjualan Aset
Non Lancar
Rp122.652.004

D.8. SURPLUS (DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR

Jumlah Surplus Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp122.652.004 dan Rp259.625.000. Rincian Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebagai berikut:

Rincian Surplus Penjualan Aset Non Lancar TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	130.705.800	259.625.000	-49.66
Beban Pelepasan Aset	8.053.796	-	-
Jumlah	122.652.004	259.625.000	-52.76

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp
35.638.742

D.9. SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar sebesar Rp 35.638.742 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	35.638.742	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah	35.638.742	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp 439.529.486.810

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 439.529.486.810 dan Rp441.097.611.138

Defisit LO
45.479.178.269

E.2. SURPLUS/(DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp45.479.178.269.00 dan Rp 41.129.029.826.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar
Rp0

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp1.533.065

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.533.065 dan Rp0.

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0

E.4.1 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tidak terdapat koreksi Atas Reklasifikasi pada Tahun 2025 dan 2024.

Selisih Revaluasi
Aset
Rp0

E.4.2 SELISIH REVALUASI ASET

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tidak terdapat koreksi akibat selisih revaluasi aset pada tahun 2025 dan 2024.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp1.533.065

E.4.3 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.533.065 dan Rp0.

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E.4.2 KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas
Rp89.478.170.982

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp 89.478.170.982 dan minus Rp42.697.154.154 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL). antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai TA 2025	Nilai TA 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.626.143.444	14.372.486.981
Diterima dari Entitas Lain	(60.423.760.643)	(58.198.413.135)
Transfer Masuk	520.892.121	1.128.772.000
Transfer Keluar	(38.201.445.904)	
Jumlah	(89.478.170.982)	(42.697.154.154)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL) yang merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara. Pada periode hingga 31 Desember 2025. DKEL sebesar Rp8.626.143.444. sedangkan DDEL sebesar minus Rp60.423.760.643.

Ekuitas Akhir
Rp 395.532.027.162

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 395.532.027.162 dan Rp 439.529.486.810.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat Pendapatan yang masih harus diterima pada Kanwil DJKN DKI Jakarta berupa pendapatan yang berasal dari Bea Lelang yang pelaksanaan Lelangnya dilaksanakan pada bulan September 2024 dan pelunasannya pada Bulan Oktober 2025.

F.2. INFORMASI PENDAPATAN AKRUAL

Daftar informasi pendapatan akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.4. PENGUNGKAPAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja pada Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta dapat dilihat pada table yang dilampirkan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

F.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia.

Sehingga Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta telah menganggarkan Belanja terkait penanganan COVID-19 pada tahun 2020 s.d.2022. untuk tahun 2025 anggaran untuk Pandemi Covid-19 sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah memasuki masa endemi.

Sentralisasi Belanja Pegawai

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2021 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak bulan Agustus tahun 2021 memberikan berdampak pada berkurangnya realisasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan beralihnya pengelolaan Belanja Pegawai ke Kantor Pusat DJKN
